

EFEKTIVITAS SANKSI ALTERNATIF (KERJA SOSIAL) DALAM KUHP BARU UNTUK TINDAK PIDANA RINGAN: TINJAUAN PUSTAKA COMPARATIF DENGAN PRAKTIK DI NEGARA LAIN

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyse the effectiveness of alternative sanctions in the form of community service under the New Criminal Code (KUHP) (Law No. 1 of 2023) for minor offences, as well as to conduct a comparative literature review of community service practices in other countries. The research method employed is a literature review (library research) using a juridical-normative approach, a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of the study indicate that community service under the New Criminal Code has great potential to serve as an effective alternative sanction, as it is designed to be more proportionate, humane, and rehabilitation-oriented compared to short-term imprisonment, whilst also addressing the issue of prison overcrowding. However, its effectiveness cannot be automatically achieved without the support of operational implementing regulations, robust oversight mechanisms, and a structured evaluation system. A comparative review with the Netherlands, the United Kingdom, and Canada shows that the success of community service is highly dependent on the strengthening of probation institutions, a strict monitoring and evaluation system, and coordination between law enforcement agencies and local governments. This study recommends that the central government immediately issue implementing regulations, optimise the role of the Correctional Services Agency, and adopt best practices from the countries under comparison to ensure that community service achieves the intended objectives of sentencing.

Keywords: *community service, New Criminal Code, alternative sanctions, minor offences, community service, restorative justice, comparative criminal law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023) untuk tindak pidana ringan, serta melakukan tinjauan pustaka komparatif dengan praktik community service di negara-negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif, statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP Baru memiliki potensi besar untuk menjadi sanksi alternatif yang efektif karena dirancang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi dibandingkan pidana penjara jangka pendek, serta mampu menjawab permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitasnya tidak otomatis tercapai tanpa dukungan regulasi pelaksana yang operasional, mekanisme pengawasan yang kuat, dan sistem evaluasi yang terstruktur. Tinjauan komparatif dengan Belanda, Inggris, dan Kanada menunjukkan bahwa keberhasilan community service sangat bergantung pada penguatan kelembagaan probation, sistem monitoring dan evaluasi yang ketat, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat segera menetapkan peraturan pelaksana, mengoptimalkan peran Balai Pemasyarakatan, dan mengadopsi best practices dari negara-negara perbandingan untuk memastikan pidana kerja sosial mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan.

Kata kunci: kerja sosial, KUHP Baru, sanksi alternatif, tindak pidana ringan, community service, pemidanaan restoratif, komparatif hukum pidana